

## BAB IV

### KEBIJAKAN THAILAND TERHADAP KETERLIBATAN MALAYSIA DI KONFLIK PATTANI

Konflik di daerah perbatasan memang selalu menjadi masalah antara dua negara yang bertetangga. Konflik kekerasan antara pemerintah pusat Thailand dengan gerakan separatis yang terjadi di daerah Thailand Selatan. Wilayah Thailand Selatan yang berbatasan dengan wilayah Malaysia akhirnya mengundang keterlibatan Malaysia di konflik ini.

Thailand memiliki beragam alasan mengapa sangat terganggu dengan aktifitas Malaysia di wilayah Thailand Selatan. Keterlibatan Malaysia di konflik Pattani sangat beralasan, Malaysia memiliki keterikatan darah yang dekat dengan orang-orang pattani yang mendapat diskriminasi HAM, selain itu adanya indikasi irredentis dalam konflik semakin membuat pemerintah Thailand semakin waspada dengan sepak terjang Malaysia.

Di antara konflik internasional yang dapat diukur, persoalan wilayah menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan sifat alamiah teritorial sebuah negara. Usaha-usaha provinsi dan wilayah untuk berpisah dari negara induknya, adalah model khusus dari konflik perbatasan. Bukan batas dari dua negara, tetapi usaha dari bagian negara itu sendiri untuk membuat perbaikan sendiri sebagai negara baru. Sebagian besar pemisahan diri ini terjadi hampir di seluruh dunia, dengan kadar keefektifan politis

yang berbeda-beda, tetapi hanya sebagian kecil saja dari mereka yang sukses untuk berpisah.

Karena nilai wilayah negara hampir sama dengan kesetiaan dan kefanatikan, perselisihan batas negara cenderung menjadi persoalan yang keras dalam hubungan internasional. Negara tidak akan menukar wilayahnya untuk mendapatkan uang atau imbalan apapun yang positif. Negara pun tidak akan cepat melupakan wilayah yang hilang secara paksa. Irredentism adalah hal dari bentuk dari nasionalisme yang mengarah secara langsung kepada konflik yang serius antar negara bagian. Karena hubungannya dengan integritas negara, wilayah menjadi jauh lebih berharga daripada nilai ekonomi atau strategi yang mereka ambil secara bersamaan.

Pengecualian untuk sikap terhadap wilayah ini digunakan untuk hal yang berhubungan dengan koloni dan kepemilikan teritorial lain dari negara. Karena hal itu bukan bagian dari wilayah pusat atau berhubungan dengan ide bangsa, maka hal itu hanya bernilai sebagai properti yang dapat dimenangkan, hilang, dijual atau diperdagangkan dalam kesepakatan politik dan perang. Tetapi kemudian dengan makin sedikitnya koloni yang tertinggal, sebagian besar wilayah dunia merupakan wilayah pusat bagi beberapa negara. Nilai suatu wilayah dalam wilayah pusat suatu negara sepertinya tidak berkurang, walaupun pengurangan kejelasan dalam nilai yang melekat pada wilayah melebihi waktu, seperti teknologi yang telah berkembang.

## A. Sikap Thailand terhadap Malaysia

Masing-masing negara akan memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan strategi atau kebijakan yang akan ambil. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menentukan strategi atau kebijakan adalah mengenali dan mengukur kemampuan diri sendiri, apakah berada pada posisi yang lebih kuat atau lebih lemah bila dibandingkan dengan negara yang akan dihadapi. Kemampuan tersebut meliputi diantaranya kekuatan politik, ekonomi dan pertahanan (militer). Dan langkah selanjutnya yaitu memperkirakan strategi yang akan diambil oleh negara yang akan dihadapi.<sup>51</sup>

Merujuk pada tipologi di atas, maka terdapat empat opsi yang dapat diambil oleh sebuah negara dalam menentukan kebijakan terhadap negara lain. Pertama, jika sebuah negara menganggap dirinya lebih kuat dari pada negara lawan dan negara lawan diasumsikan berada pada posisi yang mengancam, maka negara tersebut akan lebih egois untuk mengambil opsi "Konfrontasi". Konfrontasi sendiri dapat diartikan sebagai keadaan yang saling bertentangan. Dan tindakan konfrontasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan embargo, pemutusan hubungan diplomatik, sanksi yang dikeluarkan secara sepihak atau bahkan dapat berupa perang.

---

<sup>51</sup> John Lovell, *Foreign Policy in perspective* (Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan International – Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, 1990, Hal 190)

Opsi memimpin, akomodasi, dan konkordans nampaknya bukan menjadi pilihan pemerintah Thailand atas keterlibatan Malaysia. Ini dibuktikan dengan sikap Thailand yang tidak mau bekerjasama, dan justru menunjukkan sikap yang berlawanan dengan Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi.<sup>52</sup> Ibukotanya adalah Kuala Lumpur. Jumlah penduduk negara ini melebihi 25 juta jiwa.<sup>53</sup> Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.<sup>54</sup>

Perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonomi Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

---

<sup>52</sup> Population (Updated 5 September 2008). Department of Statistics Malaysia

<sup>53</sup> Cia world factbook 2010

<sup>54</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>. Diakses 12 april 2010

Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran.

Sedangkan Kerajaan Thailand, kadangkala juga disebut Mueang Taek, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Thailand dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai" yang berarti "kebebasan" dalam bahasa Thailand, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai,<sup>55</sup>

Thailand adalah negara yang memiliki tingkat homogenitas sangat tinggi, dengan populasi penduduk sekitar 65 juta jiwa<sup>56</sup>. Dengan komposisi suku Thailand 75%, Cina 14%, lain 11%. Thailand memiliki sumber daya alam berupa timah, karet, gas alam, tungsten, tantalum, kayu, timah, ikan, gipsum, lignit, fluorit, dan tanah yang subur, yang sangat berpengaruh terhadap ketergantungan terhadap negara lain.

---

<sup>55</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand>, diakses 12 april 2010

<sup>56</sup> [www.CIA.gov/worldfactbook2010](http://www.CIA.gov/worldfactbook2010)

Politik luar negeri Thailand tidak dapat dilepaskan dari kosepsi keamanan nasional negara tersebut mengingat politik luar negeri bertujuan, antara lain, memelihara dan mempertahankan keamanan nasional setiap bangsa. Sejak militer berkuasa di Thailand kosepsi keamanan nasional merupakan salah satu produk rezim militer Thailand yang berkuasa. Sebagaimana rezim lain di Asia Tenggara, militer Thailand menjadikan kesatuan, stabilitas, tata tertib, dan disiplin sebagai nilai-nilai dasar yang menopang negara Thailand.<sup>57</sup> Secara umum nilai-nilai tersebut mencerminkan watak otoriter rezim militer yang menantang pendapat atau kekuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai dasar diatas.

## **B. Kebijakan Thailand terhadap Malaysia**

### **B.1. Di masa Thaksin Shinawatra**

Thaksin shinawatra menilai Malaysia terlalu sering turut campur terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayah Thailand Selatan. Keterlibatan Malaysia dianggap sudah menjadi sebuah bentuk intervensi terhadap kedaulatan Thailand. Segala tindakan malaysia selalu direspon negatif oleh pemerintah Thailand khususnya di bawah pemerintah PM Thaksin Shinawatra, meskipun maksud dan tujuan Malaysia adalah untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan. Wilayah perbatasan Thailand dan Malaysia diduga menjadi basis serangan bersenjata oleh Thailand,

---

<sup>57</sup> Panitan Wattanayagorn, "*Thailand : The Elite's Shifting Conceptions of Security,*" dalam alagappa, hal.420

sebuah serangan terhadap depot militer di Provinsi Narathiwat. Saat itu empat tentara tewas. Para pakar keamanan memperkirakan sekitar 5.000 warga memiliki kewarganegaraan ganda Thailand dan Malaysia. Dengan status itu mereka dapat menyeberangi perbatasan sesuka hati. Kedua negara bertetangga itu telah memberi perhatian atas isu kewarganegaraan ganda itu. Pemerintah Thailand telah memulai survei detail terhadap mereka yang memiliki dua kebangsaan.

Pada tanggal 18 Februari 2004, Pemerintah Thailand berencana membangun pagar keamanan di beberapa bagian perbatasannya dengan Malaysia. Pagar itu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mengakhiri gelombang kekerasan di wilayah selatan Thailand yang didominasi muslim. Menurut sumber pemerintah, proposal pembangunan pagar itu tercetus dalam pembicaraan Thaksin dengan para pejabat tinggi keamanan. *Harian Bangkok Post* melaporkan, Thaksin yang mengusulkan pembangunan pagar dengan tujuan mencegah kaum separatis bersembunyi di Malaysia dan sewaktu-waktu menyelinap kembali ke Thailand. Salah satu kasus yang terkait masalah kewarganegaraan ganda adalah kasus penangkapan terhadap warga yang bernama Chae Kumae Kuteh (juga dikenal sebagai Abdul Rahman Ahmad dan Doramae Kuteh).<sup>58</sup> Chae Kumae Kuteh merupakan buronan Thailand yang dinilai bertanggung jawab atas beberapa serangkaian

---

<sup>58</sup> John Funston, *Thailand's Southern Fires: The Malaysian Factor*, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australian National University page 62

serangan yang terjadi di Pattani. Malaysia menolak menyerahkan buronan tersebut karena memiliki kewarganegaraan Malaysia.

Intervensi Malaysia atas kebijakan pemerintah Thailand terhadap kebijakan pemerintah Thailand di Thailand selatan memang menjadi ancaman, selain memburuknya citra Thailand sebagai suatu negara di dunia internasional, ketakutan utama dari pemerintah pusat Thailand yang lain karena upaya pemisahan diri propinsi-propinsi di Thailand selatan yang penduduknya merupakan mayoritas Muslim dan Melayu.

Rabu, 7 April 2004, Malaysia menunjukkan sikap sangat terganggu atas tuduhan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bahwa Malaysia menyembunyikan teroris separatis. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia Najib Razak yang meluapkan kejangkelannya terhadap tuduhan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bahwa negaranya melindungi para teroris separatis muslim. Najib membantah bahwa para pengebom dan geng yang bertanggung jawab atas serangan di Thailand Selatan menyeberang ke Malaysia.

Thaksin secara tersirat menuduh Malaysia mungkin menutup mata terhadap kegiatan separatis di Pattani ketika ia berkata: "Sekarang ada desa-desa di Malaysia utara di mana separatis Muslim bertanggung jawab untuk semua kekerasan ini telah berada. Kami tidak menuduh pemerintah Malaysia melindungi para militan ini tapi mereka tahu dimana mereka ". Di bulan Juli kepala tentara daerah Angkatan Darat Keempat kepala Letnan



Jendral Pisarn Wattanawongkeeree, mengatakan bahwa para pemimpin separatis mengadakan pertemuan di Kelantan untuk merencanakan serangan besar. Serangan 4 Januari dan 28 April adalah serangan yang direncanakan di Kelantan, seperti yang dilansir harian the Nation.<sup>59</sup>

Thailand juga menyalahkan Malaysia untuk penulis booklet yang berjudul, *Berjihad Di Patani (Perang Suci di Patani)*, yang ditemukan di tubuh salah satu yang korban tewas dalam masjid Krue Se dan secara luas booklet ini dilihat memberikan ideologis panduan untuk pemberontak kaum Muslim. Penulis kemudian ditangkap oleh pihak berwenang Malaysia, tapi kemudian menolak untuk menyerahkannya ke pihak Thailand karena ia memegang kewarganegaraan Malaysia.<sup>60</sup>

Hubungan Thailand-Malaysia memburuk secara signifikan, selama pemerintahan Thaksin, tuduhan bahwa militan menggunakan wilayah Malaysia untuk merencanakan dan latihan untuk serangan.

Para pemimpin Malaysia terkejut kekejaman hak asasi manusia seperti Tak Bai Oktober 2004 insiden di mana 78 pemprotes Muslim dicekik sampai mati di bagian belakang truk tentara Thailand. Abdullah Ahmad Badawi selaku Perdana Menteri Malaysia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika Thailand dapat menahan krisis, kekerasan akan menyebar, mungkin menyeberangi perbatasan ke Malaysia. Pernyataan lain juga

---

<sup>59</sup> *ibid*  
<sup>60</sup> *ibid*

diungkapkan oleh menteri luar negeri Malaysia pada saat itu yaitu Menteri Luar Negeri Syed Hamid mengatakan kepada media lokal bahwa permasalahan di Thailand adalah persoalan internal, tetapi ia memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar bisa memiliki implikasi negatif terhadap Asia Tenggara secara keseluruhan.<sup>61</sup>

Hubungan semakin memburuk ketika Thaksin menuduh bahwa militan selatan dilatih di hutan-hutan Kelantan. Abdullah Ahmad Badawi marah menolak tuduhan, menyatakan "bukan dasar yang dapat digunakan oleh setiap kelompok berencana untuk mengambil tindakan terhadap negara lain seperti yang dilansir Straits Times pada 19 Desember 2004."<sup>62</sup>

Penurunan Hubungan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2005 ketika 131 Muslim menyeberang ke Malaysia meminta suaka dengan alasan karena penganiayaan dari penguasa Thailand. Setelah insiden Krue Se Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi segera menawarkan perlindungan bagi mereka yang mencari perlindungan sementara dari kerusuhan. Sekitar 131 pengungsi Thailand Selatan menyeberang ke wilayah Malaysia untuk mencari perlindungan. Dalam kesempatan ini Menteri Luar Negeri Syed Hamid mengatakan kepada media lokal bahwa

---

<sup>61</sup> Opcit 61

<sup>62</sup> Ian Storey, Malaysia's Role in Thailand's Southern Insurgency, Terrorism Monitor Volume: 5 Issue: 5, March 15, 2007, [http://www.jamestown.org/single/?no\\_cache=1&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=1043](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1043). diakses 22 april 2010

permasalahan di Thailand adalah persoalan internal, tetapi Ia memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar bisa memiliki implikasi negatif terhadap Asia Tenggara secara keseluruhan.

konflik diplomatik meningkat di bulan Oktober ketika Menteri Luar Negeri Syed Hamid mengatakan Malaysia tidak akan mengembalikan kelompok penguungsi kecuali Thailand menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Duta Besar Malaysia untuk Thailand dipanggil untuk menerima protes resmi dari Thailand.<sup>63</sup>

Menanggapi pernyataan menteri luar negeri Malaysia Departemen Luar Negeri Thailand melakukan pernyataan protes yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Malaysia. 7 Oktober 2005, Sihasak Phuanketkeow Juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Direktur Jenderal Departemen Penerangan Thailand. diungkapkan dalam konferensi pers dengan Dato Shaarani Bin Ibrahim, Duta Besar dari Malaysia untuk Thailand.

Departemen Luar Negeri Thailand mengajukan protes sehubungan dengan komentar-komentar yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid, protes in terkait kasus dari 131 orang yang diduga melarikan diri ke Malaysia.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> John Funston, *Thailand's Southern Fires: The Malaysian Factor*, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australian National University p. 60

<sup>64</sup> <http://www.mfa.go.th/web/showNews.php?newsid=14317&Qsearch=malaysia%20cooperation> Thailand Ministry of Foreign Affairs official website, diakses 22 april 2010

Protes yang diajukan oleh pemerintah Thailand terhadap Pernyataan dari menteri Luar negeri Malaysia. Thailand menilai bahwa Pernyataan yang dilaporkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia terhadap hak asasi manusia dari 131 orang pengungsi tidak sesuai, karena menjadi interferensi dalam urusan internal Thailand. Di samping itu, pernyataan tersebut akan mendorong 131 orang untuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah sendiri.

Selanjutnya, Jaminan keamanan dan hak-hak dasar kelompok ini seharusnya tidak menjadi masalah karena baik Perdana Menteri Thailand dan Menteri Luar Negeri telah berulang kali dinyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa pemerintah Thailand menjamin keselamatan dan keamanan mereka yang ingin kembali.

Thailand berharap bahwa kedua belah pihak akan berkoordinasi dan tetap berhubungan dekat untuk memungkinkan para pejabat di tanah dari kedua belah pihak yang saat ini bekerja sama untuk membuat kemajuan dalam melakukan langkah-langkah praktis dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.

Selain itu, pihak Thailand juga ingin menekankan kebutuhan untuk kedua belah pihak untuk berkoordinasi erat untuk mencegah setiap laporan berita yang bisa menyebabkan kebingungan tentang masalah ini. Pada hal ini, Thailand telah diyakinkan oleh pihak Malaysia pada beberapa

kesempatan. Oleh karena itu, Thailand berharap bahwa kedua belah pihak akan terus bekerja sama atas dasar ini untuk menghasilkan resolusi masalah ini secepat mungkin.

Di tahun 2006 Pemerintah Malaysia akhirnya memulangkan 131 Muslim Thailand Selatan. Paling tidak pada akhir tahun 2005 kedua pemerintah telah melakukan persetujuan atas kepulangan mereka. Tapi pada 20 Juni 2006 Menteri Dalam Negeri Thailand Kongsak Vantana, kembali mengisyaratkan keterlibatan pihak "luar" dalam membuat bom-bom, setelah komentar-komentar sama yang diucapkannya pekan lalu memicu tanggapan marah dari Malaysia. Menlu Malaysia Syed Hamid lalu mengecam kembali Bangkok dan mengatakan bahwa "mencari kambing hitam untuk membenarkan apa yang terjadi tidak akan membantu meredakan ketegangan di wilayah selatan yang rawan itu."<sup>65</sup>

Kejadian yang sama terjadi 11 bulan kemudian tepatnya pada tanggal 16 desember 2006, Kantor berita nasional Malaysia, Bernama mengatakan, 20 warga muslim Thailand melintasi perbatasan secara gelap ke Malaysia dengan alasan mereka menghadapi prosekusi militer Thailand. Bernama melaporkan kelompok pendatang gelap itu datang dari provinsi Narathiwat, salah satu dari tiga provinsi selatan Thailand yang umumnya muslim di perbatasan Malaysia. Kelompok itu terdiri dari pria, wanita dan

---

<sup>65</sup> Menlu Thailand: Malaysia Tidak Terlibat Ledakan Bom, dalam berita *kapanlagi.com* 20 Juni 2006, <http://www.kapanlagi.com/h/0000121053.html> diakses 9 feb 2010

anak-anak muda usia dua tahun. Ini adalah insiden pertama seperti itu yang dilaporkan sejak Agustus 2005.<sup>66</sup>

Dimasa Thaksin Shinawatra, berungkali terjadi ketegangan antara pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia, berbagai media melaporkan hubungan yang tidak harmonis antara kedua negara ini. Tapi pasca kudeta terhadap Thaksin yang kemudian dilanjutkan oleh panglima Surayud Chulanont yang bertugas sebagai perdana menteri Thailand, ketegangan antara kedua negara ini menurun meskipun masih ada beberapa tuduhan keterlibatan Thailand yang dilontarkan pemerintah Thailand.

## **B.2. Di masa Surayud Chulanont**

Pasca kudeta terhadap Thaksin Shinawatra, Surayud Chulanont menjadi perdana menteri yang menggantikan posisi yang ditinggalkan Thaksin. Selasa 21 November 2006. Perdana Menteri Surayud Chulanont menyatakan pada hari Selasa bahwa restoran dan kios yang menjual Tom Yam Kung Thai di Malaysia telah mendanai gerakan pemberontak yang terlibat dalam kekerasan sehari-hari di tiga provinsi selatan Thailand.

“Hal ini menegaskan bahwa separatist mampu melanjutkan serangan dan penggerombakan karena mereka didanai oleh Tom Yam Kung Thai

---

<sup>66</sup> 20 Muslim Thailand Lari ke Malaysia Karena Takut Prosekusi Militer Thailand dalam berita VOA news bahasa Indonesia, 16 Desember 2006, [http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-12/2006-12-16\\_voa1.cfm?moddate=2006-12-16](http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-12/2006-12-16_voa1.cfm?moddate=2006-12-16). diakses 9 feb 2010

jaringan restoran. Restoran ini mengumpulkan uang melalui pemerasan dan tuntutan untuk biaya perlindungan dari pengusaha lokal dan menyalurkannya ke separatis”, kata Surayud.

Surayud mengatakan pemerintah berupaya untuk memecah jaringan untuk menghentikan serangkaian serangan kekerasan di Narathiwat, Pattani dan Yala provinsi. Ada ratusan Thai Tom Yam Kung kios dan restoran di sepanjang perbatasan Thailand dan Malaysia, terutama di kota Kota Baru di Kelantan, serta di ibukota Kuala Lumpur. Sebagian besar restoran yang dimiliki oleh umat Islam Thailand dari tiga provinsi bermasalah di Thailand.<sup>67</sup>

### **B.3. Di masa Abhisit Vejjajiva**

Sikap konfrontasi Thailand terhadap Malaysia mengalami perubahan di masa kepemimpinan Abhisit Vejjajiva. Sikap konfrontasi yang selalu muncul seperti yang dilakukan oleh Thaksin Shianawatra tidak lagi nampak pada kebijakan-kebijakan Abhisit. Di era kepemimpinan Abhisit Vejjajiva justru menjadi sebuah kerjasama. Pada 9 Juni 2009 Malaysia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama dalam menanggapi keresahan di wilayah bergolak Thailand selatan, saat Perdana Menteri Thai Abhisit Vejjajiva mengadakan kunjungan resmi pertamanya ke Malaysia.

---

<sup>67</sup> Tam Yam Kung networks in Malaysia finance insurgents : PM, *the nation headlines*, November 21, 2006, [http://nationmultimedia.com/2006/11/21/headlines/headlines\\_30019561.php](http://nationmultimedia.com/2006/11/21/headlines/headlines_30019561.php). Diakses 9 feb 2010

“Kami berterima kasih kepada pemerintah Malaysia atas kerjasama erat dan dukungan bagi masalah itu, baik dalam bidang keamanan maupun sosial-ekonomi,” kata perdana menteri Thai seperti dikutip Bernama, kantor berita negara Malaysia.<sup>68</sup>

Kerjasama Thailand dan Malaysia ini sangat sesuai dengan kebijakan luar negeri Thailand yang menyatakan Mengembangkan hubungan dengan negara-negara tetangga di setiap dimensi dan di semua tingkatan untuk menumbuhkan pemahaman yang baik dan saling menghormati dalam rangka untuk meningkatkan stabilitas, keamanan dan kemakmuran di daerah melalui promosi kerjasama di semua wilayah di bawah kerangka sub-regional serta secepatnya menyelesaikan masalah dengan negara tetangga melalui damai berarti berdasarkan perjanjian yang relevan dan undang-undang.<sup>69</sup>

Dan di poin berikutnya yang isinya mempromosikan kerjasama yang erat dengan negara-negara Muslim dan internasional organisasi Islam untuk

---

<sup>68</sup> Malaysia-Thailand kerja sama tangani Thailand selatan dalam *Finroll - Indonesia Largest Information Portal and Gateways*, 09 June 2009, <http://automotive.id.finroll.com/mobil/21-berita-terkini/13832-malaysia-thailand-kerja-sama-tangani-thai-selatan.html>. diakses 9 feb 2010

<sup>69</sup> Policy Statement of the Government of Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister, to the National Assembly, 30 December B.E. 2551 (2008) page 25. *Policy on Foreign Affairs and International Economics point 7.1*



menciptakan pemahaman yang benar dan dukungan untuk Thailand upaya menyelesaikan masalah provinsi-provinsi perbatasan selatan.<sup>70</sup>

Menurut Bernama, kedua negara itu akan bekerjasama dalam menawarkan kesempatan kepada pemuda Thailand selatan untuk membantu mencapai perdamaian dan ketenangan. Kedua pemimpin itu membicarakan kerjasama di bawah naskah tiga E, yakni pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan, kata Abhisit.<sup>71</sup>

Permasalahan batas wilayah yang biasanya menjadi faktor utama dalam sebuah konflik yang mempertemukan dua negara yang berbatasan memang tidak menjadi masalah di konflik yang terjadi antara Thailand dan Malaysia. Ketidakinginan masyarakat Melayu-Muslim untuk berasimilasi dengan budaya Thai disebabkan oleh kepercayaan mereka yang sangat kuat tentang asal-usul mereka, baik secara historis maupun budaya, yang mempunyai hubungan dekat dengan bangsa Melayu. Pengaruh Islam dan budaya Melayu yang kuat dari negara Malaysia juga turut andil membentuk identitas yang demikian mengakar dalam masyarakat di Selatan, terutama Pattani.

---

<sup>70</sup>ibid page 25. *Policy on Foreign Affairs and International Economics*, point 7.3

<sup>71</sup> Malaysia – Thailand Kerja Sama Tangani Thai Selatan dalam *harian berita sore*, 9 Juni 2009, <http://beritasore.com/2009/06/09/malaysia-thailand-kerja-sama-tangani-thai-selatan/>. Diakses 23 april 2010.